

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti pada bab IV mengenai pengaruh standar akuntansi pemerintahan (SAP), sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD), kompetensi sumber daya manusia (SDM) dan sistem pengendalian intern (SPI) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil uji t diperoleh nilai  $t_{hitung}$  6,158 > nilai  $t_{tabel}$  1,664 dengan signifikansi 0,002 di bawah atau lebih kecil dari 0,05. Maka dinyatakan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada BPKAD Provinsi Sumatera Selatan. Semakin baik penerapan standar akuntansi pemerintah, maka semakin baik kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Berdasarkan hasil uji t diperoleh nilai  $t_{hitung}$  7,955 > nilai  $t_{tabel}$  1,664 dengan signifikansi 0,005 di bawah atau lebih kecil dari 0,05. Maka dinyatakan bahwa Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada BPKAD Provinsi Sumatera Selatan. Semakin baik penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, maka semakin baik kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Berdasarkan hasil uji t diperoleh nilai  $t_{hitung}$  1,161 > nilai  $t_{tabel}$  1,664 dengan signifikansi 0,000 di bawah atau lebih kecil dari 0,05. Maka dinyatakan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada BPKAD Provinsi Sumatera Selatan. Semakin baik kompetensi sumber daya manusia, maka semakin baik kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

4. Berdasarkan hasil uji t diperoleh nilai  $t_{hitung} 4,767 > \text{nilai } t_{tabel} 1,664$  dengan signifikansi 0,000 di bawah atau lebih kecil dari 0,05. Maka dinyatakan bahwa Sistem Pengendalian Intern secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada BPKAD Provinsi Sumatera Selatan. Semakin baik sistem pengendalian intern, maka semakin baik kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
5. Berdasarkan hasil uji F diperoleh nilai  $F_{hitung} 10,841 > \text{nilai } F_{tabel} 2,49$  dengan signifikansi 0,000 dibawah atau lebih kecil dari 0,05. Maka dinyatakan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Intern secara bersama-sama (simultan) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada BPKAD Provinsi Sumatera Selatan. Semakin baik Penerapan standar akuntansi pemerintah, sistem akuntansi keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern, maka semakin baik kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

## 5.2 Saran

Terlepas dari keterbatasan yang dimiliki, hasil penelitian ini diharapkan mempunyai implikasi yang luas untuk BPKAD Provinsi Sumatera Selatan dan peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, yaitu:

1. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebaiknya selalu mempertahankan dan mengoptimalkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan meningkatkan penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), selalu memperhatikan tingkat kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahlian, terutama di bidang akuntan pemerintahan atau akuntansi sektor publik, dan Sistem Pengendalian Intern (SPI).
2. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan menambahkan variabel-variabel lainnya yang memiliki pengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Beberapa variabel yang diduga memiliki pengaruh terhadap kualitas

laporan keuangan pemerintah daerah diantaranya adalah pemahaman akuntansi, pemanfaatan teknologi informasi dan peran internal audit.

3. Penelitian selanjutnya lebih baik menambahkan populasi dan sampel penelitian pada Organisasi Publik Daerah (OPD) diluar BPKAD seperti di Inspektorat ataupun di OPD di Kab/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan.